

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. SISTEMATIKA	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	4
2.1. EKONOMI MAKRO	4
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN	6
2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	19
4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	19
4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	19
4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	19
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	26
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	27
5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBD	27
5.2.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBD	27
5.2.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	28
5.1.2.1. PENDAPATAN	28
5.1.2.2. BELANJA	36
5.1.2.3. PEMBIAYAAN	50
5.1.2.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	52
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA	53
5.2.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	53
5.2.2. PENJELASAN POS-POS NERACA	53
5.2.2.1. ASET	53
5.2.2.2. KEWAJIBAN	74
5.2.2.3. EKUITAS DANA	78
5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	82
5.3.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	82
5.3.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS	82
5.3.2.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	82

5.3.2.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NONKEUANGAN	83
5.3.2.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	85
5.3.2.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	86
5.3.2.5. POSISI KAS DAERAH	88
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	89
6.1. ENTITAS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	89
6.2. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	93
6.3. PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	94
6.4. PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	96
BAB VII PENUTUP	97
LAMPIRAN	